

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

“Istilah hukuman dan pidana dibedakan oleh Sarjana Hukum Indonesia yang kemudian dalam bahasa Belanda dikenal menjadi satu istilah yang sama, yaitu *straf*. Arti hukuman merupakan sesuatu yang umum untuk segala bentuk sanksi, seperti sanksi perdata, pidana, administratif dan disiplin. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berhubungan dengan hukum pidana”.<sup>1</sup> “Wirjono Prodjodikoro memaparkan, hukum pidana merupakan peraturan hukum tentang pidana. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa memberikan (menjatuhkan) kepada seorang sebagai hal yang tidak mengenakan dan juga tidak sehari-hari diberikan”.<sup>2</sup>

Hukum Pidana dapat dibagi menjadi Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Khusus terdapat diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dikutip dalam Hukum Pidana Indonesia oleh Andi Hamzah, perundang-undangan pidana umum

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.26.

<sup>2</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta:Muhammadiyah University Press, hlm.19.

adalah KUHP dan perundang-undangan yang berperan menambah dan mengubah KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 18 (Prp) 1960, dan lain-lain. Sementara perundangan pidana khusus adalah semua perundangan di luar KUHP dan perundang-undangan yang lebih lengkap, dapat berupa perundang-undangan pidana atau yang bukan pidana dengan sanksi pidana.

“Perbuatan Pidana Narkotika atau Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu dari Pidana Khusus. Berdasarkan jalan pikiran Scholten dan Mostert, yang termasuk hukum pidana khusus atau hukum pidana pemerintahan (*ordeningsstrafrecht*) adalah Undang-Undang Perpajakan, Narkotika, Arsip, Nuklir, Agraria, Perkawinan, Perburuhan, Tera, dan lain-lain, karena undang-undang tersebut bukan bagian dari perundang-undangan pidana tetapi perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana”.<sup>3</sup> Oleh karena itu, Tindak Pidana Narkotika ini diatur tersendiri di luar KUHP yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana perbuatan pidana pada umumnya, perkara narkotika juga diselesaikan melalui lembaga peradilan. Oleh karena itu, dengan adanya peradilan pidana di Indonesia, maka akan ada penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Penyelesaian perkara di peradilan juga memerlukan suatu bentuk pembuktian. Pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial terutama dalam hukum acara pidana, hal ini bertujuan untuk menentukan nasib dari terdakwa yang melakukan tindak pidana. Penentuan terkait Bersalah atau

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm.13.

tidaknya terdakwa suatu tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan melalui suatu proses yang disebut pembuktian”.<sup>4</sup>

“Pembuktian merupakan ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan mengenai cara yang dibenarkan oleh undang-undang, yaitu membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa suatu tindak pidana”.<sup>5</sup>

“Meletakan kebenaran yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan, hakim diharuskan untuk dapat menguji kebenaran tersebut yang dibantu dengan alat bukti yang telah dijelaskan dalam undang-undang, sebagaimana Pasal 184 KUHAP”.<sup>6</sup>

“Tes Urine adalah salah cara untuk melakukan pembuktian Tindak Pidana Narkotika atau Penyalahgunaan Narkotika. Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya. Sampel urine yang telah diperoleh oleh pihak BNN kemudian akan dilakukan pemeriksaan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN”.<sup>7</sup>

“Hasil positif tes urine yang telah dilakukan pemeriksaan akan dimasukan dalam berita acara pengujian yang kemudian dijadikan sebagai

---

<sup>4</sup> Syaiful Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian Dalam beberapa Praktik Peradilan*, Depok:Gramata Publishing, hlm.15.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.20.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.21.

<sup>7</sup> Ilman Hadi, 2013, *Kekuatan Pembuktian Tes Urine dalam Perkara Narkotika*, dalam [www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt505cf66e1932d/kekuatan-pembuktian-tes-urine-dalam-perkara-narkotika](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt505cf66e1932d/kekuatan-pembuktian-tes-urine-dalam-perkara-narkotika) diakses Kamis, 22 Agustus 2019 16.36.

alat bukti surat. Berita acara pengujian tidak semata-mata menjadi satu-satunya alat bukti yang dibutuhkan. Pembuktian masih membutuhkan alat bukti lain guna menjatuhkan pidana kepada tersangka atau terdakwa. Seseorang yang telah melakukan tes urine dan sampel urinenya dinyatakan positif mengandung narkoba, artinya orang tersebut terindikasi kuat sebagai penyalahguna narkoba. Apabila seseorang terbukti bersalah, hakim wajib dalam putusannya memperhatikan kewajiban dari terdakwa guna menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkoba”.<sup>8</sup> dari latar belakang tersebut, maka penulis memilih judul: “PERAN TES URINE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PERSIDANGAN”

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Suatu penelitian harus dibatasi terkait dengan lingkup dan objek penelitiannya, ini bertujuan agar penelitian mengarah pada pembahasan yang diharapkan, fokus pada rencana yang telah disusun dan tidak menimbulkan kekeliruan oleh pembaca. Penelitian ini akan dibatasi pada peran tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkoba di persidangan.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

- a. Bagaimana peran hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkotika di persidangan ?
- b. Bagaimana kedudukan hasil tes urine sebagai alat bukti dalam persidangan ?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap hasil tes urine dalam penjatuhan putusan tindak pidana narkotika ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Mengetahui peran hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkotika di persidangan.
- b. Mengetahui kedudukan hasil tes urine sebagai alat bukti dalam persidangan.
- c. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap hasil tes urine dalam penjatuhan putusan tindak pidana narkotika.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai tindak pidana narkotika dan proses perkara di persidangan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai tindak pidana narkotika bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang aturan hukum tindak pidana narkoba.

#### D. Kerangka Pemikiran

“Penyalahgunaan narkoba menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar, diperkirakan terjadi peningkatan Rp. 63,1 triliun menjadi 143, 8 triliun pada tahun 2020. Jenis narkoba yang sering disalahgunakan adalah ganja, opioid, kokain atau tipe *amphetamine* dan kelompok simulan.”<sup>9</sup> “Hal lain yang mengesankan dalam perkembangan permasalahan terkait narkoba secara mendunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkoba yang bukan hanya berfokus pada ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan. Disamping itu, guna kepentingan nasional dan kepentingan dalam negeri, akan diperoleh kepastian dan kemanfaatan dalam pengaturan peredaran narkoba dan psikotropika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan”.<sup>10</sup>

Permasalahan narkoba sudah menjadai penyakit masyarakat di semua negara di dunia. “Oleh karena itu, mayoritas anggota PBB menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988. Konvensi 1988 ini bertujuan agar dapat memberantas perdagangan gelap narkoba dan psikotropika”.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ilham Hariaji, 2017, *Gambaran Penyalahgunaan Tetrahydrocannabinol (THC) dan Metamphetamine (Met) Pada Usia Pra Kuliah di Kota Medan Dan Sekitarnya Tahun 2016*, Vol 2 No 1 Pebruari 2017, hlm.10.

<sup>10</sup> Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, hlm.140-141.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 140.

“Berdasarkan Pasal 75 huruf 1 bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonuleat (DNA) dan/atau tes bagian tubuh lainnya. Hal ini artinya, melakukan tes urine merupakan kewenangan penyidik BNN dalam melakukan tugas penyidikan. UU Narkotika tidak menjelaskan bahwa tes urine ini wajib, namun bertujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya narkotika dalam tubuh seseorang. Jika memang tidak adanya tes urine namun orang yang diduga penyalahguna narkotika memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tentang penguasaan narkotika, akibat hukumnya adalah tetap dapat dikenakan ancaman pidana sesuai pasal tersebut. Sampel urine tersebut akan diuji di laboratorium uji narkoba BNN yang kemudian hasil pengujian itu digunakan untuk pembuktian perkara dan dituangkan dalam berita acara pengujian”.<sup>12</sup>

“R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.<sup>13</sup> “Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sebagaimana yang ada pada Pasal 184 ayat (1) dan (2) telah disebutkan alat-alat bukti yang dianggap sah menurut undang-undang. Surat

---

<sup>12</sup> Edy Kastro, 2018, *Akibat Hukum Apabila Tersangka Menolak Untuk Tes Urine Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Terkait Dengan Hak Asasi Tersangka*, Edisi No. XXXIX Tahun XXX September 2018, hlm.1554.

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta:Erlangga, Hlm.3.

merupakan salah alat bukti yang sah dengan ketentuan sebagaimana yang ada dalam Pasal 186 KUHP. Oleh karena itu, berita acara pengujian mengenai tes urine dapat dijadikan sebagai alat bukti.

## **E. Metode Penelitian**

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>14</sup> Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. “Yuridis empiris adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat dalam sistem kehidupan yang diperoleh langsung dari obyeknya”.<sup>15</sup> Penelitian ini melihat dari segi yuridis melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melihat peran dari tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkoba di persidangan.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Penulis akan menggambarkan peran dari hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkoba di persidangan dan melakukan analisis terhadap peran tes urine di persidangan.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, hlm. 35.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, hlm.67



### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus dan Reserse Narkoba Kota Surakarta sebagai pendukung.

### 4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yaitu sebagaimana yang menjadi lokasi penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder dapat terbagi menjadi bahan hukum sebagai berikut:<sup>16</sup>

##### 1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

##### 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur terkait objek penelitian.

---

<sup>16</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.19.

- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Melakukan pencarian, pencatatan, menganalisis, dan mempelajari literatur-literatur yang berupa bahan pustaka.

##### b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap hakim-hakim atau aparat-aparat di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus yang berhubungan dengan persidangan terkait peran dari tes urine dalam tindak pidana narkoba dan Penyidik Reserse Narkoba Kota Surakarta sebagai pendukung.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, bertujuan agar dapat menggambarkan keadaan yang sesuai fakta terkait objek kajian.

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini untuk mempermudah memberikan gambaran dan mempelajari isinya.

Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Tinjauan Pustaka yang memuat mengenai Tinjauan Umum tentang Narkotika, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum tentang Pembuktian dan Tinjauan Umum tentang Tes Urine dalam Tindak Pidana Narkotika.

Hasil Penelitian dan pembahasan dari objek penelitian mengenai peran tes urin dalam pembuktian tindak pidana narkotika di pengadilan.

berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran dari akhir penelitian